

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. CV ABC menjalin kerja sama dengan PT BCA sejak tahun 2015 dengan melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik, seperti menghitung, membayar dan melapor setiap transaksi yang terkait dengan usahanya. Hanya saja, CV ABC melakukan kesalahan dalam menggunakan tarif atas Jasa Konstruksi. Tarif yang digunakan oleh CV ABC tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Kesalahan tersebut terjadi kurang lebih hampir dua tahun dari tahun 2018 hingga 2019.
2. IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) CV ABC sudah habis masa berlakunya sejak akhir tahun 2017. Tidak berlakunya IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) CV ABC bukan maksud ingin melakukan penghindaran pajak agar pajak yang dibayarkan lebih kecil. Hal tersebut karena kurangnya pemahaman atau sosialisasi dari pihak perusahaan akan masa berlakunya IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi). Dari pihak CV ABC mengira bahwa IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) berlaku hingga 5 tahun. Namun, sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa IUJK (Izin Usaha Jasa

Konstruksi) hanya berlaku selama 3 tahun atau mengikuti masa berlakunya SBU (Sertifikat Badan Usaha). Berdasarkan perhitungan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 untuk Pelaksanaan Konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha dengan menggunakan tarif sebesar 4%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak yang akan dibayarkan akan jauh lebih tinggi dari sebelumnya.

3. Karena sudah habisnya masa berlaku IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) yang dimiliki oleh CV ABC, hal tersebut berdampak pada kekeliruan tarif yang digunakan. Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut adalah pajak yang dikenakan jauh lebih tinggi dari sebelumnya maka terjadi selisih yang mengakibatkan pajak kurang bayar. Selisih kurang bayar terjadi pada transaksi tahun 2018 hingga pertengahan tahun 2019 dengan nominal yang cukup besar.
4. CV ABC melaksanakan kewajibannya dengan membayar selisih kurang bayar sebesar Rp 131.660.00,00 beserta sanksi administrasi selama 21 bulan sebesar Rp 55.297.200,00. Total keseluruhan beban pajak yang harus dibayar oleh CV ABC sampai batas waktu April 2020 sebesar Rp 186.957.200,00. Apabila CV ABC merasa keberatan, maka dapat mengajukan keringan atas pajak kurang bayar tersebut. selain itu, CV ABC juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai suatu perusahaan yang bergerak dibidang

jasa konstruksi dengan melakukan perpanjangan IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi), serta meningkatkan pemahaman atau informasi mengenai IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) atau perizinan lainnya terakait dengan jasa kontruksi tersebut.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis bagi beberapa pihak terkait permasalahan tersebut antara lain :

1. Bagi CV ABC

CV ABC disarankan untuk lebih memahami dan memperhatikan setiap peraturan, perizinan maupun kepengurusan yang lain terkait dengan usaha jasa kontruksi perusahaan tersebut, supaya tidak terjadi kesalahan penggunaan tarif yang dikarenakan kurangnya pemahaman informasi seputar IUJK (Izin Usaha Jasa Kongsruksi). CV ABC juga diharapkan selalu *update* peraturan – peraturan perpajakan yang berhubungan dengan usahanya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat membahas PPh Pasal 4 (2) tentang Jasa Konstruksi lebih baik lagi. Supaya tidak terjadi lagi permasalahan seperti yang dialami oleh CV ABC, dan apabila terjadi permasalahan yang sama penulis dapat membahas sesuai dengan peraturan yang terbaru.

3. Bagi Pihak KPP

Pihak KPP selaku petugas pajak (fiskus) dapat melakukan tindakan – tindakan untuk mencegah kasus semacam yang dialami oleh CV ABC karena kurangnya pengetahuan akan IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi). Pihak KPP dapat melakukan sosialisasi yang lebih teratur dan detail untuk Wajib Pajak khususnya untuk perusahaan yang baru berdiri atau perusahaan yang baru menjadi Wajib Pajak.

